

Implementasi Program Desa Cerdas di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Ira Rahmawati¹⁾, Khotami²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nst No.113, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

Email : irarahmawati868@student.uir.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Smart Village program in realizing smart governance in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. This study employs the Van Meter and Van Horn policy implementation theory, which consists of six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, implementer disposition, and the social, economic, and political environment. The research method used is a qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consist of village officials and community members as service users, selected purposively based on their involvement in the program implementation. The results indicate that the implementation of the Smart Village program has been running quite well, particularly in terms of the clarity of program objectives and technological support. However, several obstacles remain, such as low digital literacy among the community, limited human resources, and suboptimal program communication. This program has had a positive impact on improving the effectiveness, efficiency, and transparency of public services, as well as facilitating easier access to administrative services for the community. Therefore, it is necessary to enhance human resource capacity and strengthen program socialization to ensure more optimal and sustainable implementation.

Keywords : Smart Village, Policy Implementation, Public Services, Village Government, Information Technology

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Perkembangan teknologi telah membuka jalan bagi transformasi besar dalam praktik tata kelola serta peningkatan efisiensi layanan (Monalisa et al., n.d.). Pemerintah Indonesia melalui program Desa Cerdas berupaya mendorong digitalisasi desa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta partisipasi masyarakat.

Program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan desa berbasis teknologi yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini memuat pemetaan potensi sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk memperluas kemitraan bagi pembangunan desa (Pranata dkk., 2023).

Secara empiris, implementasi program Desa Cerdas ditargetkan untuk 3000 desa pada tahun 2024 (Putri et al., 2024) dan saat ini telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu lebih dari 33.000 jiwa, sehingga memiliki kebutuhan pelayanan publik yang kompleks. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa telah memanfaatkan teknologi informasi

untuk mendukung layanan administrasi, seperti pembuatan surat keterangan secara digital serta penyediaan informasi melalui media online. Selain itu, telah dilakukan berbagai pelatihan seperti literasi digital, Internet of Things (IoT), dan pengembangan UMKM berbasis teknologi. Namun demikian, hasil pra-observasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut belum berjalan optimal, ditandai dengan masih standar dan sasaran program desa cerdas yang belum dirumuskan dan dipahami dengan jelas, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengelola sistem berbasis teknologi, serta ditemukannya pelaksanaan yang pasif dalam penggunaan teknologi yang memengaruhi konsistensi dan efektivitas implementasi tata kelola cerdas.

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Menurut Kamal Alamsyah (2019) dalam Khotami et al. (2023), kebijakan publik merupakan penerapan strategi dan sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, implementasi kebijakan tidak terlepas dari peran aktor-aktor lokal. Kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan melalui Peraturan Desa sebagai

pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa (Khotami, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi juga pada tahap implementasinya di lapangan. Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn. Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Agostino, 2010). Dalam konteks desa cerdas, keenam variabel tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan tata kelola cerdas berbasis teknologi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa implementasi konsep desa cerdas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek sumber daya manusia, literasi digital masyarakat, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Fatimah et al. (2020) mengkaji pembangunan menuju desa cerdas, menemukan bahwa lingkungan dan infrastruktur menjadi permasalahan utama dalam membangun desa cerdas di salah satu desa di Jawa Barat. Selanjutnya, Kharisma (2024) melakukan studi implementasi smart village di desa wisata yang menekankan pada pelestarian kearifan lokal. Lalu Hombore (2025) yang melakukan penelitian terkait tantangan transformasi digital untuk smart village menemukan bahwa SDM dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam implementasi desa cerdas. Penelitian lain juga menegaskan bahwa keberhasilan program digitalisasi desa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa dan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Apid, 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek umum implementasi desa cerdas, dan belum secara spesifik mengkaji implementasi pada pilar tata kelola cerdas di tingkat desa dengan pendekatan teori implementasi kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan program desa cerdas dengan realitas implementasinya di tingkat desa, khususnya dalam mewujudkan tata kelola cerdas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji implementasi program desa cerdas dengan fokus pada pilar tata kelola cerdas menggunakan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn di Desa Pandau Jaya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program desa cerdas dalam mewujudkan tata kelola cerdas di Desa Pandau Jaya serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi program Desa Cerdas

dalam mewujudkan tata kelola cerdas di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri dari kepala desa sebagai informan kunci serta aparatur desa dan masyarakat sebagai informan pendukung, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dalam program.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

III. PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan 10 informan yang terdiri dari aparatur desa dan masyarakat. Berdasarkan jenis kelamin, informan didominasi oleh laki-laki sebanyak 70% dan perempuan 30%. Dilihat dari usia, informan terbagi merata antara kelompok usia 25–42 tahun dan 43–60 tahun, masing-masing sebesar 50%. Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar informan memiliki pendidikan Strata Satu (50%), diikuti SLTA (30%), dan SD (20%).

B. Implementasi Program Desa Cerdas

Untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Program Desa Cerdas, Van Mater dan Van Horn mengidentifikasi enam variabel penting, yaitu: standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik yang dapat menilai kinerja Implementasi Program Desa Cerdas di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa cerdas di Desa Pandau Jaya telah dilaksanakan berdasarkan enam indikator tersebut, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

1. Standar dan Sasaran

Aspek standar dan sasaran dapat ditinjau dari kejelasan tujuan dan sasaran program. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tujuan program Desa Cerdas sudah cukup jelas, yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam urusan administrasi seperti pembuatan surat agar target dari program desa cerdas ini dapat tercapai. Akan tetapi, pihak desa terkendala dalam penyampaian tujuan-tujuan program Desa Cerdas sehingga banyak masyarakat yang tidak terlalu paham tentang tujuan program tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Sejalan dengan pendapat Armalita dan Khotami (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan yang disusun dengan baik secara struktural dan substansi akan lebih mudah diimplementasikan dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Namun demikian, dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kejelasan kebijakan belum diiringi dengan proses sosialisasi yang efektif, sehingga

pemahaman masyarakat terhadap program masih terbatas. Maka dari itu kejelasan tujuan perlu diiringi dengan penyampaian yang jelas dan inklusif kepada masyarakat agar, seluruh masyarakat paham akan program yang dilaksanakan.

Lalu jika ditinjau dari sasaran program, secara umum program ini dimaksudkan untuk melibatkan semua orang di Desa Pandau Jaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan layanan yang mudah diakses. Disamping itu sasaran program desa cerdas di Desa Pandau Jaya ialah untuk mendukung perekonomian seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pengembangan usaha. Namun terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya, termasuk pemahaman masyarakat yang kurang tentang penggunaan teknologi, akibatnya sasaran program belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua sub-indikator, yaitu kejelasan tujuan dan sasaran program, dapat disimpulkan bahwa indikator standar dan sasaran dalam implementasi Program Desa Cerdas di Desa Pandau Jaya pada dasarnya telah dirumuskan dengan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Program ini mempermudah pelayanan administrasi, meningkatkan transparansi dana desa, serta memanfaatkan teknologi digital lewat website. Sasaran programnya juga sudah luas karena ditujukan untuk seluruh masyarakat, termasuk perangkat desa dan pelaku UMKM. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada kendala, seperti belum semua masyarakat paham tujuan program, keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi, serta sosialisasi yang masih kurang merata. Akibatnya, pemanfaatan program belum maksimal. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Hakim et al. (2026) yang menyatakan bahwa minimnya sosialisasi menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui atau enggan memanfaatkan layanan digital desa. Jadi, perlu ada upaya lebih seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan supaya masyarakat bisa lebih paham dan manfaat program bisa dirasakan secara menyeluruh.

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya terdiri dari sumber daya manusia atau perangkat dan kondisi anggaran. Berdasarkan temuan penelitian, sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan program desa cerdas sudah dianggap memadai dan membantu menjalankan program. Namun demikian, keberhasilan program masih menjadi masalah, terutama dalam hal meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, peneliti menemukan bahwa pemerintah Desa Pandau Jaya telah melakukan program bimbingan teknis menuju program desa cerdas, namun kegiatan bimbingan teknis yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pelaksana program. Ini menunjukkan bahwa proses transfer pengetahuan dan keterampilan belum berjalan dengan baik, yang menyebabkan implementasi program di lapangan belum

maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan intensitas bimbingan teknis diperlukan agar pemahaman pelaksana program lebih merata dan mendalam. Kemampuan aparatur desa dan masyarakat dalam penggunaan teknologi menjadi faktor dominan yang memengaruhi implementasi program.

Sumber daya dari segi anggaran yang merupakan dukungan finansial yang diperlukan untuk menjalankan program di Desa Pandau Jaya masih terbatas. Hasil penelitian mengungkapkan setiap penginputan data hanya dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 setiap tahunnya. Sedangkan alokasi dana sering kali difokuskan pada kegiatan mendesak yang menyebabkan dukungan terhadap pengembangan program, terutama dalam hal digitalisasi, menjadi kurang optimal. Disamping itu, pendanaan alternatif juga tidak tersedia sehingga keberlanjutan program sulit dicapai yang menyebabkan pelaksanaan program desa cerdas tidak dapat berjalan sepenuhnya. Hasil ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan pendanaan merupakan kendala utama dalam implementasi *smart village* di Indonesia (Jusuf dan Fitriyani, 2025; Azis et al., 2025; Sahputra dan Pudjadiaraka, 2025).

3. Karakteristik Pelaksana

Karakteristik pelaksana merujuk pada bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi secara jelas kepada setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan program. Aspek karakteristik pelaksana ditinjau dari pembagian tugas dan tingkat profesionalitas.

Pembagian tugas penting agar setiap pelaksana memahami peran dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun kekosongan peran. Pembagian tugas yang baik biasanya ditandai dengan adanya kejelasan uraian tugas, kesesuaian antara kemampuan pelaksana dengan tugas yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara struktural pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program sudah jelas. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pembagian tugas dan wewenang telah ditetapkan, namun masih terdapat staf yang belum menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan oleh kepala desa. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih pekerjaan karena aparatur desa juga memiliki tugas tambahan di luar program desa cerdas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural pembagian tugas telah jelas, dalam praktiknya masih terdapat kendala pada aspek komitmen dan konsistensi pelaksana. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan program, khususnya dalam mendukung pelayanan administrasi berbasis digital.

Sejalan dengan itu, Suryandari et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi program *Smart Village* hingga pada tahap pelayanan administrasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola desa. Administrasi desa yang terkelola dengan baik akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh

karena itu, aparatur desa dituntut untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya, terutama dalam mewujudkan desa cerdas yang efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya dari segi tingkat profesionalitas, peneliti menemukan bahwa perangkat desa pada umumnya telah menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya inisiatif untuk meningkatkan kemampuan diri, baik melalui pelatihan maupun pembelajaran mandiri, serta belum meratanya tingkat kedisiplinan antar perangkat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum profesionalitas sudah cukup baik, masih terdapat perbedaan kualitas kinerja antar individu yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi maupun kedisiplinan, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal, konsisten, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Mengingat, pelaksanaan program-program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur lokal (Khotami, 2016). Maka perlu ditekankan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, sistem kerja, serta tata kelola kelembagaan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap inovasi (Wahyiah, 2025).

4. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Aspek komunikasi antar badan pelaksana terdiri dari sosialisasi dan koordinasi. Berdasarkan temuan di lapangan, sosialisasi atau penyebaran informasi mengenai program tata kelola cerdas sudah dilakukan tapi masih belum merata di kalangan masyarakat. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat belum mendengar tentang tata kelola cerdas dalam pelayanan Desa Pandau Jaya. Oleh karena itu, sosialisasi program desa cerdas di Desa Pandau Jaya masih perlu ditingkatkan. Efektivitas sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam implementasi desa cerdas diperkirakan akan meningkat dengan adanya upaya yang lebih terorganisir dan keterlibatan beberapa kelompok di tingkat desa.

Adapun dalam hal koordinasi, ditemukan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan Kemendes sudah mulai berjalan dengan memanfaatkan teknologi, seperti pelaksanaan rapat atau sosialisasi secara online, yang menunjukkan adanya upaya untuk tetap menjaga komunikasi dan kerja sama meskipun terdapat keterbatasan jarak dan waktu. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman tentang program desa cerdas, perangkat desa juga telah berkolaborasi melalui kegiatan literasi digital. Namun, koordinasi ini masih belum optimal, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi aktif sebagian perangkat desa dan keterbatasan dalam memahami materi yang disampaikan.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi antar organisasi dalam program desa cerdas di Desa Pandau Jaya sudah berjalan, tetapi belum optimal. Sosialisasi yang belum merata dan koordinasi yang belum konsisten menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan strategi sosialisasi yang lebih luas dan langsung ke masyarakat, serta perbaikan sistem koordinasi yang lebih rutin, terbuka, dan melibatkan semua pihak agar informasi bisa tersampaikan dengan jelas dan program dapat berjalan lebih efektif serta dipahami oleh seluruh masyarakat.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Aspek disposisi terdiri dari sikap, perangkat, dan resistensi. Sikap perangkat Desa Pandau Jaya dalam implementasi program desa cerdas sudah menunjukkan sikap yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya kemauan dan upaya dari aparatur desa untuk menjalankan program sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan bahwa respons perangkat desa terhadap penerapan digitalisasi pelayanan tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan digitalisasi yang dapat meningkatkan kemudahan serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang cukup terasa, seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya, serta masih rendahnya keterlibatan masyarakat. Kondisi ini membuat usaha yang sudah dilakukan belum bisa berjalan maksimal.

Sedangkan dalam hal resistensi atau reaksi maupun tanggapan dari pelaksana dan masyarakat dalam program desa cerdas yang dijalankan, menunjukkan bahwa tidak ada penolakan secara langsung terhadap program desa cerdas baik dari perangkat desa maupun masyarakat. Bahkan program ini dianggap bermanfaat dan membantu dan memudahkan masyarakat dalam pelaporan kejadian dan mempercepat proses pelayanan. Namun beberapa masyarakat menunjukkan kurangnya keinginan dalam menggunakan teknologi baru yang dipengaruhi oleh kekhawatiran akan melakukan kesalahan dan keterbatasan kemampuan. Di samping itu, beberapa warga juga masih mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi karena keterbatasan kemampuan.

Berdasarkan hal tersebut, secara umum perangkat desa Pandau Jaya sudah memiliki sikap yang cukup positif dan mendukung pelaksanaan program desa cerdas, terlihat dari semangat dan upaya untuk menjalankan program serta memanfaatkan digitalisasi dalam pelayanan. Namun, di sisi lain, masih ada hambatan seperti keterbatasan kemampuan, kurangnya rasa percaya diri dalam menggunakan teknologi, dan kebiasaan lama yang masih dipertahankan. Selain itu, walaupun tidak ada penolakan secara langsung dari masyarakat maupun perangkat desa, tetap ada resistensi terselubung, seperti rasa enggan atau kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital. Kondisi ini membuat pelaksanaan program belum berjalan maksimal. Jadi, ke depan perlu ada pendampingan yang lebih intens,

pelatihan yang berkelanjutan, dan pendekatan yang lebih sederhana supaya semua pihak bisa lebih siap dan nyaman dalam menjalankan program desa cerdas.

6. Kondisi Lingkungan Sosial dan Budaya

Pada aspek lingkungan sosial dan budaya, ditinjau dari kondisi ekonomi dan budaya masyarakat. Berdasarkan temuan peneliti tentang kondisi ekonomi masyarakat, ditemukan bahwa tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses teknologi. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun pemerintah desa telah berusaha untuk menyediakan fasilitas pendukung dan meningkatkan pelayanan digital, orang-orang dengan keterbatasan ekonomi masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses *smartphone* dan internet. Sehingga masyarakat dengan keterbatasan ekonomi cenderung masih bergantung pada fasilitas manual yang disediakan oleh pemerintah desa. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik relatif lebih mudah mengakses dan memanfaatkan layanan berbasis digital.

Adapun dalam hal budaya, masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih terbiasa dan lebih nyaman dengan pelayanan tatap muka, meskipun sudah ada dukungan program digitalisasi. Namun, sebagian masyarakat lainnya juga sudah mulai mengalami digitalisasi, namun membutuhkan waktu dan adaptasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hakim (2026) bahwa resistensi budaya yang muncul mencerminkan bahwa transformasi digital merupakan proses sosial yang memerlukan adaptasi terhadap nilai, kebiasaan, dan pola interaksi masyarakat. Menurut pernyataan informan, reaksi masyarakat terhadap digitalisasi pelayanan pada dasarnya cukup baik. Namun, beberapa kelompok masyarakat, terutama warga lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan teknologi, menghadapi tantangan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dari kondisi ekonomi dan budaya masyarakat, terlihat bahwa lingkungan sosial dan ekonomi di Desa Pandau Jaya punya pengaruh besar terhadap jalannya program Desa Cerdas. Dari sisi ekonomi, masih ada perbedaan kemampuan antar warga dalam mengakses teknologi, di mana yang ekonominya lebih baik cenderung lebih mudah ikut dan memanfaatkan layanan digital, sementara yang ekonominya terbatas masih mengalami kendala seperti tidak punya perangkat atau kesulitan membeli kuota internet. Dari sisi budaya, sebenarnya masyarakat sudah mulai terbuka dengan digitalisasi, apalagi generasi muda, tapi masih ada juga yang bertahan dengan cara manual karena sudah terbiasa atau merasa lebih nyaman. Jadi, walaupun program ini diterima dengan cukup baik, pelaksanaannya belum merata karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda

IV. KESIMPULAN

Implementasi program Desa Cerdas di Desa Pandau Jaya telah berjalan, namun belum optimal dalam mewujudkan tata kelola cerdas. Kendala utama meliputi

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya sosialisasi program, serta keterbatasan anggaran. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang masih terbiasa menggunakan layanan manual turut menghambat adopsi teknologi digital. Oleh karena itu, keberhasilan program desa cerdas memerlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi komunikasi dan sosialisasi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Apid, M. 2024. Peran Pemerintah Desa Dalam Memajukan Desa Cerdas (Smart Village) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Desa Margajaya, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi*. Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah.
- Armalita, Y., & Khotami. 2025. Analisis Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. 1, 1–11.
- Azis, D. R., Nursetiawan, I., & Nurwanda, A. 2025. Transformasi Digital Pemerintahan Desa (Studi Peran Kepala Desa dalam Implementasi Sistem Informasi Berbasis Website di Desa Ciharang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis). *Journal Sains Student Research*, 3(4), 304-317.
- Fatimah, S., Judawinata, G., Barkah, M. N., Trimo, L., & Deliana, Y. 2020. Towards Smart Village: A Case Study of Genteng Village Development in Sumedang, West Java, Indonesia. *Society*, 8(2), 663-676. DOI: 10.33019/society.v8i2.264
- Hakim, R. L. 2026. Tantangan Implementasi Digitalisasi Desa Di Indonesia: Tinjauan Literatur. *PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy*, 1(2), 50–61. Retrieved from <https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/patriot/article/view/90>
- Hombore, E. 2025. Smart Village sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(1), 122-131. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.380>
- Jusuf, H., & Fitriyani, F. 2025. Implementasi dan Evaluasi Digitalisasi Administrasi Kependudukan pada Layanan Desa Cicalengka Kulon. *Jurnal Informatika Dan Komputasi: Media Bahasan, Analisa Dan Aplikasi*, 19(1), 8–2. <https://doi.org/10.56956/jiki.v19i1.416>
- Kharisma, I. 2024. Implementasi Konsep Smart Village Di Desa Lerep, Kecamatan ungaran Barat, Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung.

- Khotami. (2016). Evaluasi pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa maredan kecamatan tualang kabupaten siak. II(April), 27-36.
- Khotami, Setiawan, R., Aprilla, I., & Andhira, A. 2023. The Effectiveness of the Implementation of the Learning Process During the 2019 Coronavirus Disease Pandemic in Ukui District , Pelalawan Regency. November, 67–73.
- Khotami, Z. 2022. Tata kelola keuangan desa di kepenghuluhan balam jaya kecamatan balai jaya kabupaten rokan hilir. 2, 47–51.
- Monalisa, Rusadi, S., & Khotami. (n.d.). Penerbitan Identitas Narapidana Melalui Inovasi Pelayanan Aplikasi Vandegan (Validasi Data Elektronik Warga Binaan). 9, 805–812.
- Pranata, A., Rahayu, D., & Yahya, R. 2023. Dilema Pengelolaan Dana Desa Masa Pandemi COVID-19. 2(2), 125–134. <http://159.223.71.124/index.php/jsb/article/view/108/144>
- Putri, A., Rahayu, D., Dwisnu, E. 2024. Program Desa Cerdas: Tantangan Implementasi Di Era Digitalisasi. *Jurnal Governansi*, 10(1), 41-54.
- Sahputra, E. S. A., & Pujadiaraka, P. 2025. Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mekarsari: Studi Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Desa. *Journal of Syntax Admiration*, 6(5), 1481-1488. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i5.2324>
- Wahyiah, I.R. 2025. Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa: Upaya Menuju Smart Village di Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 832-849. DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.382>